

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah kesempatan daerah untuk menjalankan otonomi. Otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya. Secara garis besar otonomi daerah yaitu diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya (Murniati, 2017).

Pembangunan daerah dilakukan agar daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan serta kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Setiap daerah diharapkan mampu memiliki inovasi serta kemandirian dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya (Christia, 2019).

Untuk membiayai berjalannya pemerintahan daerah diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. PAD merupakan sumber pembiayaan untuk membiayai dan menunjang pembangunan daerah. Pemerintah daerah sudah semestinya memaksimalkan penyerapan PAD. Pendapatan asli daerah dapat dipakai dalam mengetahui berhasil atau tidaknya otonomi daerah (Rosa, 2020)

Pemda memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari PAD akan berpengaruh dalam kemandirian daerah dalam mendanai kebutuhannya. Suatu daerah dapat dikatakan maju dalam hal ekonomi ketika pendapatan asli daerahnya tinggi dan sebaliknya. Sehingga,

pemerintah daerah harus meningkatkan PAD dari sumber yang ada (Humairah, 2021).

Retribusi daerah dapat dijadikan salah satu parameter dalam mengetahui tingkat kemampuan pendanaan daerah. Apabila retribusi tinggi maka kontribusinya terhadap PAD akan semakin tinggi juga. Selain sebagai sumber penerimaan daerah, retribusi daerah juga memiliki kontribusi dalam mendanai pemerintahan daerah. Sebagai salah satu penunjang pendanaan pemerintahan, retribusi daerah harus digali dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Adapun upaya dalam mengoptimalkan kemandirian pendanaan daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan penyerapan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Itarini, 2020).

Efektivitas retribusi daerah merupakan penilaian terhadap realisasi retribusi daerah selama satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah sudah efektif atau tidak, dapat diketahui melalui perbandingan antara realisasi dengan target retribusi. Kontribusi retribusi daerah dapat dinilai dengan melihat perbandingan penerimaan retribusi dengan total PAD selama satu periode. Salah satu cara untuk memaksimalkan retribusi daerah yaitu meningkatkan efektivitas retribusinya dengan cara meningkatkan pengelolaan retribusi dan menggali sumber atau potensi retribusi yang baru (Utami, 2018).

Data yang diperoleh di BPS Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang memiliki wilayah paling luas serta penduduk dengan jumlah terbanyak di Pulau Bali. Hal ini memiliki pengaruh terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Buleleng. Potensi yang besar ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng agar dapat digali dan

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin baik pengelolaan dan penyerapan retribusi daerah maka semakin maksimal kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah selain harus dimaksimalkan juga harus dikelola dengan seefektif mungkin, dalam artian target retribusi daerah harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Retribusi berperan dalam peningkatan PAD, jika retribusi daerah dimaksimalkan, pendapatan yang diterima daerah akan semakin besar (Amalia, 2019).

BPKPD sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam menggali dan mengelola PAD Kabupaten Buleleng, Wawancara pada BPKPD terkait penyerapan retribusi daerah, dengan narasumber Bapak Ida Bagus Perang Wijaya selaku Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi menyatakan bahwa permasalahan dalam penyerapan retribusi daerah adalah belum tercapainya target realisasi anggaran retribusi daerah pada tahun 2017 - 2021. Berikut merupakan data target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng pada 2017 - 2021:

Tabel .1 1 Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017-2021			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2017	20.888.456.640,00	17.076.083.898,00	81,75%
2018	21.511.113.000,00	19.056.986.034,00	88,59%
2019	25.650.000.000,00	20.319.816.298,00	79,22%
2020	21.994.682.500,00	19.809.775.071,00	90,07%
2021	45.478.089.193,00	36.150.491.390,00	79,48%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng

Dari data tersebut, fenomena yang terjadi yaitu belum tercapainya target retribusi daerah pada tahun 2017-2021. Realisasi retribusi pada tahun 2017 sebesar 81,75%, 88,59% pada tahun 2018, 79,21% pada tahun 2019, 90,06% pada tahun 2020 dan sebesar 58,65% pada tahun 2021. Retribusi daerah sempat mengalami peningkatan persentase pada tahun 2018, kemudian kembali turun pada tahun 2019, dan selanjutnya meningkat di tahun 2020 namun kembali turun pada tahun 2021. Kemampuan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat dikatakan belum maksimal karena terdapat ketidakefektifan realisasi retribusi daerah yang persentasenya masih dibawah 100%.

Secara tidak langsung belum tercapainya target pendapatan asli daerah akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pemerintah daerah. Selain itu berkurangnya pendapatan yang diterima dari retribusi daerah akan mengurangi jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja. Besarnya penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa besar upaya dalam memungut retribusi daerah. Realisasi target retribusi daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan diperlukan kinerja yang optimal dalam mengelola dan menggali retribusi daerah (Romiyati, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho (2017) menyatakan bahwa rata – rata tingkat efektivitas retribusi Provinsi Yogyakarta adalah 103%. Berdasarkan rata – rata tersebut dapat diketahui efektivitas retribusi Provinsi Yogyakarta tergolong sangat efektif. Sehingga, kesimpulan yang didapat adalah pengelolaan retribusi yang dilakukan sudah optimal(Nugroho, 2017).

Berdasarkan penelitian Murniati (2017) menyatakan bahwa efektivitas realisasi retribusi pelayanan pasar pada 2011 adalah 58,92% dan tergolong dalam kategori tidak efektif. pada tahun 2012 dan tahun 2013 persentasenya sebesar 100% sehingga masuk dalam kategori efektif. Namun tahun 2014 persentasenya turun menjadi 3,95% sebagai kategori tidak efektif. Tahun 2015 persentasenya adalah 11,18% dan termasuk kategori tidak efektif (Murniati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Engkus (2019) menyatakan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Daerah Bandung kurang optimal. Fungsi manajemen yaitu pengawasan dan pengendalian merupakan fungsi yang seharusnya diperhatikan oleh manajer dari tingkat kebijakan dan tingkat lapangan. Pengawasan dilakukan dengan tiga cara yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Engkus, 2019).

Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada topik pembahasan yang diangkat yaitu berfokus dalam analisis efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng. Selain itu penelitian ini dilakukan pada tempat dan rentang data yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Lokasi Penelitian ini berada di BPKPD Kabupaten Buleleng, Bali.

Oleh karena itu berdasarkan teori dan data realisasi anggaran pada tahun 2017 - 2021 diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis serta solusi dari belum tercapainya target retribusi daerah Kabupaten Buleleng. Judul yang penulis tetapkan yaitu **“Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Belum tercapainya target retribusi daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
2. Terjadinya selisih antara target retribusi daerah dengan realisasinya
3. Belum efektifnya penyerapan retribusi daerah

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan penelitian ini yaitu analisis efektivitas serta kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan belum tercapainya target retribusi daerah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penelitian maka rumusan masalah yang didapat yaitu:

1. Bagaimana efektivitas realisasi retribusi daerah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng?
3. Apa saja faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas realisasi retribusi daerah Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng
4. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi serta menambah wawasan tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Agar mampu menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya apabila ingin membuat penelitian sejenis.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan masukan dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dan penerimaan retribusi daerah

